



LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2025** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban **Pemerintah Kabupaten Bima** atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah selama Tahun Anggaran 2025.

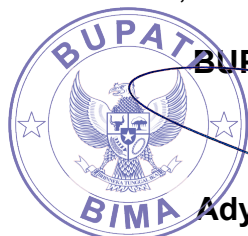
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun sebagai implementasi dari **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)** sebagaimana diamanatkan dalam **Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Melalui laporan ini disajikan informasi mengenai capaian kinerja **Pemerintah Kabupaten Bima** selama Tahun 2025 yang diukur berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

LKjIP ini memuat gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, realisasi indikator kinerja utama, serta analisis terhadap keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi **Pemerintah Kabupaten Bima** dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian pembangunan daerah pada tahun-tahun mendatang.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan laporan kinerja di masa yang akan datang. Semoga **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2025** ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat serta menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel di lingkungan **Pemerintah Kabupaten Bima**.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan **Pemerintah Kabupaten Bima** yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini.

Bima, 30 Maret 2026


BUPATI BIMA

Ady Mahyudi

IKHTISAR

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pembangunan daerah Kabupaten Bima Tahun 2025, secara umum capaian kinerja menunjukkan hasil yang cukup baik. Hal ini tercermin dari hasil evaluasi terhadap **26 sasaran pembangunan daerah** yang diukur melalui berbagai indikator kinerja utama. Dari hasil pengukuran tersebut diperoleh **rata-rata persentase capaian sasaran sebesar sekitar 92 persen**, yang menunjukkan bahwa sebagian besar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai atau mendekati target yang direncanakan.

Capaian tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Bima telah berjalan secara relatif efektif dalam mendukung pencapaian sasaran strategis pemerintah daerah. Beberapa indikator bahkan menunjukkan capaian yang melampaui target yang telah ditetapkan, terutama pada indikator yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang capaiannya belum optimal, khususnya pada sektor ekonomi, investasi daerah, serta beberapa indikator lingkungan dan sosial yang masih memerlukan penguatan kebijakan dan program.

Selanjutnya, pencapaian terhadap **Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima** yang terdiri dari **enam tujuan utama** juga menunjukkan kinerja yang bervariasi. Tujuan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia menunjukkan capaian yang sangat baik dan telah melampaui target yang ditetapkan. Sementara itu, tujuan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi daerah, kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan wilayah berkelanjutan secara umum telah mencapai sebagian besar target, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan pada beberapa indikator pendukung.

Secara keseluruhan, capaian kinerja pembangunan daerah Kabupaten Bima pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa arah kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan telah berada pada jalur yang tepat dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Ke depan, pemerintah daerah perlu terus meningkatkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan, disertai dengan penguatan koordinasi antar perangkat daerah, sehingga pencapaian target pembangunan daerah pada tahun-tahun berikutnya dapat lebih optimal.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. GAMBARAN UMUM KABUPATEN BIMA	2
1.3. SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN BIMA	2
1.4. SUMBER DAYA MANUSIA	3
1.5. ISU STRATEGIS.....	3
1.6. LANDASAN HUKUM	4
1.7. MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.8. SISTEMATIKA PENULISAN.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
2.1. RPJMD 2025-2029.....	6
2.2. RENCANA KERJA TAHUN 2025	12
2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	15
BAB III AKUNTABILITAS	19
3.1. PENCAPAIAN KINERJA ORGANISASI	19
Tujuan 1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Dan Akuntabel, Serta Berdaya Saing Untuk Mencapai Pelayanan Publik Prima	19
Tujuan 2 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	21
Tujuan 3 Meningkatnya Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan.....	26
Tujuan 4 Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif.....	27
Tujuan 5 Terwujudnya Masyarakat Yang Harmonis	37
Tujuan 6 Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	38
3.2. REALISASI ANGGARAN	41
BAB IV PENUTUP.....	71

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Bima Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama satu tahun anggaran. Penyusunan laporan ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, setiap perangkat daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan secara terarah dan terukur. Oleh karena itu, penyusunan laporan kinerja menjadi salah satu instrumen penting dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang telah dilaksanakan.

LKjIP Kabupaten Bima Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya yang menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Melalui laporan ini disajikan informasi mengenai capaian kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan selama tahun anggaran berjalan.

Bab I Pendahuluan ini menjelaskan gambaran umum mengenai kondisi Kabupaten Bima yang meliputi kondisi wilayah, susunan organisasi Pemerintah Kabupaten Bima, kondisi sumber daya manusia aparatur, serta isu-isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Selain itu, pada bab ini juga dijelaskan landasan hukum penyusunan laporan, maksud dan tujuan penyusunan LKjIP, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, serta sistematika penulisan laporan.

1.2. GAMBARAN UMUM KABUPATEN BIMA

Kabupaten Bima merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara geografis Kabupaten Bima terletak di bagian timur Pulau Sumbawa dan memiliki wilayah yang cukup luas dengan karakteristik wilayah yang beragam. Luas wilayah Kabupaten Bima tercatat sekitar **438.490 hektar atau sekitar 4.389 km²** yang secara administratif terbagi ke dalam **18 kecamatan dan 191 desa**. Dengan luas wilayah tersebut, Kabupaten Bima memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar yang dapat mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

Kondisi geografis Kabupaten Bima terdiri dari wilayah dataran rendah, perbukitan hingga kawasan pesisir yang memberikan peluang pengembangan berbagai sektor pembangunan seperti sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta sektor lainnya yang berpotensi mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, posisi Kabupaten Bima yang berada di wilayah timur Pulau Sumbawa menjadikan daerah ini memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya dalam pengembangan potensi wilayah serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

1.3. SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

Pemerintah Kabupaten Bima dipimpin oleh Bupati yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Wakil Bupati serta didukung oleh berbagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta melaksanakan program pembangunan daerah. Susunan organisasi Pemerintah Kabupaten Bima diatur dalam **Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima**. Berdasarkan peraturan tersebut, organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima terdiri atas:

- Sekretariat Daerah

- Sekretariat DPRD
- Inspektorat
- Dinas Daerah
- Badan Daerah
- Kecamatan

Setiap perangkat daerah memiliki tugas dan fungsi dalam melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, serta berperan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah secara terpadu.

1.4. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Bima didukung oleh sumber daya manusia aparatur yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Keberadaan ASN memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Berdasarkan data yang tersedia, jumlah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima tercatat sebanyak **10.362 orang** yang tersebar pada berbagai perangkat daerah.

Apabila dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi ASN di Kabupaten Bima cukup beragam mulai dari lulusan sekolah dasar hingga jenjang pendidikan doktoral. Jumlah ASN terbanyak berada pada tingkat pendidikan **Sarjana (S1)** sebanyak **7.553 orang**, sedangkan jumlah ASN paling sedikit terdapat pada tingkat pendidikan **Sekolah Dasar (SD)** sebanyak **6 orang**. Sementara itu apabila dilihat berdasarkan golongan kepangkatan, jumlah ASN terbanyak berada pada **Golongan III** sebanyak **3.958 orang**, sedangkan jumlah ASN paling sedikit berada pada **Golongan I** sebanyak **10 orang**.

Komposisi sumber daya manusia aparatur tersebut memberikan gambaran mengenai kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bima dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

1.5. ISU STRATEGIS

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bima dihadapkan pada berbagai tantangan dan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang

berkelanjutan. Salah satu isu strategis yang menjadi perhatian dalam pembangunan daerah Kabupaten Bima adalah upaya mewujudkan masyarakat yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Pembangunan sumber daya manusia yang memiliki kualitas keimanan, pengetahuan, serta akhlak yang baik menjadi landasan penting dalam mendukung pembangunan daerah.

Penguatan nilai-nilai keagamaan serta peningkatan kualitas pendidikan masyarakat diharapkan dapat membentuk karakter masyarakat yang religius, berintegritas, dan memiliki kemampuan dalam menghadapi berbagai dinamika perkembangan zaman.

1.6. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Bima Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Adapun landasan hukum penyusunan laporan ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2025-2029

1.7. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan LKjIP Kabupaten Bima Tahun 2025 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kabupaten Bima dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah selama satu tahun anggaran.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah:

1. Menyajikan informasi mengenai capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bima.
2. Mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.
3. Mendorong peningkatan kinerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
4. Menjadi bahan evaluasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun berikutnya.

1.8. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Bima Tahun 2025 disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Memuat gambaran umum Kabupaten Bima, susunan organisasi pemerintah daerah, kondisi sumber daya manusia aparatur, isu strategis, landasan hukum, maksud dan tujuan, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, serta sistematika penulisan laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Memuat dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan daerah termasuk tujuan, sasaran, indikator kinerja serta perjanjian kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menyajikan hasil pengukuran dan analisis capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bima berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Bab IV Penutup

Berisi kesimpulan serta rekomendasi perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, efektif dan efisien serta akuntabel, Pemerintah Kabupaten Bima dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek seperti Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perencanaan tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK).

2.1. RPJMD 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah, memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RPJMD Kabupaten Bima disusun sebagai penjabaran visi, misi dan program dari bupati dan wakil bupati terpilih sebagai dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode (lima) tahun. Sesuai peraturan perundang-undangan maka setelah pasangan Ady Mahyudy dan dr. Irfan dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bima untuk periode Tahun 2025-2029.

RPJMD 2025-2029 ditujukan untuk melanjutkan kembali kemajuan pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Sehubungan hal tersebut, untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Bima dalam lima Tahun kedepan telah dirumuskan Visi dan Misi Kabupaten Bima sebagai berikut :

Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima



Visi

**“Bima Bermartabat yang Berkemajuan,
Makmur, Tangguh dan Berkelanjutan”**

Misi

1. Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berorientasi Hasil
2. Membangun Sumber Daya Manusia Bima yang Berkemajuan, Tangguh dan Berdaya Saing
3. Memantapkan Pembangunan Infrastruktur untuk mewujudkan ketahanan pangan, energi, air melalui Penegakan Tata Ruang yang Berkelanjutan
4. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Produktivitas, Daya Saing dan Ekosistem Industri Komoditas Unggulan
5. Membangun Kapasitas Pemahaman dan Pengamalan Keagamaan Untuk Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak, Aman, Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Perbub No. 2 Tahun 2025)
VISI 1 BIMA BERMARTABAT YANG BERKEMAJUAN, MAKMUR, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN			
Misi 1 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berorientasi Hasil			
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel, serta berdaya saing untuk mencapai pelayanan publik prima		Indeks Reformasi Birokrasi
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
		Meningkatnya profesionalitas dan integritas ASN	Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN)
		Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Indeks Pelayanan Publik (IPP)
Misi 2 : Membangun Sumber Daya Manusia Bima yang Berkemajuan, Tangguh dan Berdaya Saing			
2.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia		Indeks Pembangunan Manusia
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)
			Prevalensi Stunting
		Terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan merata	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
			Harapan Lama Sekolah (HLS)
			Persentase Peserta Didik kabupaten Bima yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:
			a) Literasi Membaca
			b) Numerasi
		Meningkatnya literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
			Indeks Masyarakat Digital Daerah (IMDI)
		Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak, serta kualitas keluarga	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)
			Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)
		Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif	Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS)

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Perbub No. 2 Tahun 2025)
Misi 3 : Memantapkan Pembangunan Infrastruktur untuk mewujudkan ketahanan pangan, energi, air melalui penegakan tata ruang yang berkelanjutan			
3.	Meningkatnya Infrastruktur yang merata dan berkeadilan		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)
		Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur wilayah	Rasio Konektivitas
			Tingkat Kemantapan Jalan
			Rasio Permukiman Layak Huni
Misi 4 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Produktivitas, Daya Saing dan Ekosistem Industri Komoditas Unggulan			
4.	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi inklusif		Pertumbuhan Ekonomi
			Kontribusi PDRB Kabupaten Bima Terhadap Provinsi
			PDRB per kapita
			Rasio Gini
			Tingkat Kemiskinan
		Meningkatkannya peran sektor pertanian dan perikanan dalam perekonomian serta meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan	Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB
			Nilai Tukar Petani (NTP)
			Nilai Tukar Nelayan (NTN)
		Meningkatnya peran industri pengolahan pada perekonomian daerah	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB
		Meningkatnya peran sektor perdagangan dalam perekonomian	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
		Meningkatnya peran UMKM dan Koperasi pada perekonomian daerah	Kontribusi UMKM terhadap PDRB
			Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB
		Meningkatnya daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB
			Nilai tambah Ekonomi Kreatif
		Meningkatnya akses keuangan yang inklusif dan merata	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)
		Terkendalinya inflasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Tingkat Inflasi

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Perbub No. 2 Tahun 2025)
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
		Meningkatnya nilai investasi daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
			Persentase peningkatan nilai investasi
		Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
		Terwujudnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
		Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa
		Meningkatnya peran pemuda dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah	Indeks Pembangunan Pemuda
Misi 5 : Membangun Kapasitas Pemahaman Dan Pengamalan Keagamaan Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak, Aman, Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya			
5.	Terwujudnya masyarakat yang Harmonis		Indeks Harmoni
		Terwujudnya kemaslahatan beragama dan pemajuan kebudayaan	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)
			Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
		Terwujudnya keamanan daerah	Indeks Kriminalitas
6.	Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
		Meningkatnya kualitas Air, udara, dan lahan	Indeks Kualitas Air
			Indeks Kualitas Udara
			Indeks Kualitas Lahan
		Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana (IRB)
			Persentase Penurunan Emisi GRK:
			(a) Kumulatif
			(b) Tahunan

Perumusan tujuan dan sasaran tersebut dilakukan melalui pendekatan kerangka logis. Pendekatan ini akan memberikan uraian terkait keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran beserta indikator tujuan dan sasaran. Hal ini penting untuk

memberikan gambaran keselarasan mulai dari visi sampai sasaran yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bima pada tahun 2025-2029.

Gambar 2.1
Kerangka Logis Sasaran dan Tujuan pada Misi 1



Gambar 3.2.
Kerangka Logis Sasaran dan Tujuan pada Misi 2



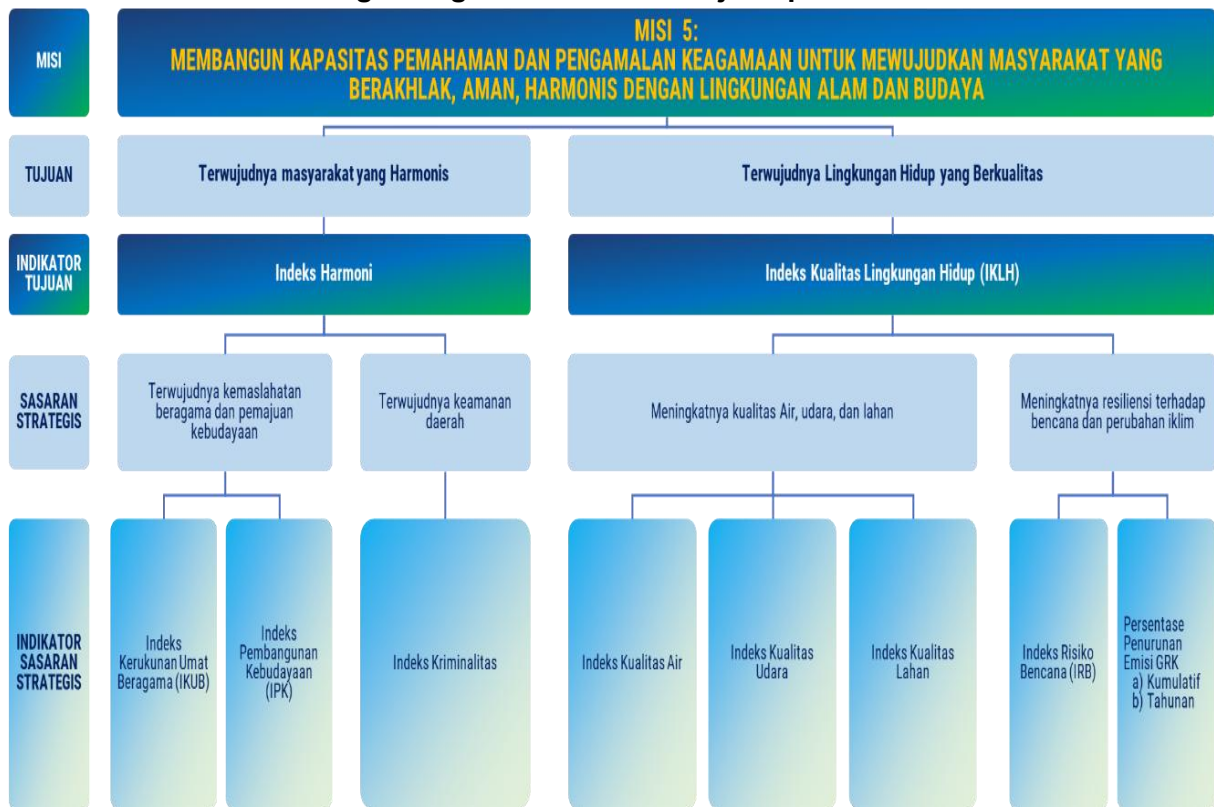
Gambar 3.3.
Kerangka Logis Sasaran dan Tujuan pada Misi 3



Gambar 3.3.
Kerangka Logis Sasaran dan Tujuan pada Misi 4



Gambar 3.3.
Kerangka Logis Sasaran dan Tujuan pada Misi 5



Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan memiliki ukuran keberhasilan yang terdapat pada indikator tujuan dan indikator sasaran. Masing-masing indikator tersebut dilengkapi target setiap tahun yaitu mulai tahun 2025 s.d 2029. Target ini akan menjadi ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan

2.2. RENCANA KERJA TAHUN 2025

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berencana Kabupaten Bima merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran Tahun ke-1 (Tahun pertama) dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2025-2029, yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2025 serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2026 – 2029, dan dalam penyusunannya juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat serta Rencana Kerja Pemerintah untuk menjaga keselarasan sasaran dan prioritas pembangunan serta program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten dengan sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi dan nasional.

Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2025 sesuai dokumen RKT dan dokumen RKPD Pemerintah Kabupaten Bima 2025 secara rinci, seperti tabel berikut :

Tabel 2.2

Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
		Indeks Reformasi Birokrasi	B (60-70)
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	70-80 (BB)
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	77,00-78,00
2,	Meningkatnya profesionalitas dan integritas ASN	Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN)	76,50
3.	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3-4
		Indeks Pembangunan Manusia	71,00
4.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	72,25
		Prevalensi Stunting	30,7
5.	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan merata	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	8,56
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,12
		Persentase Peserta Didik kabupaten Bima yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	
		a) Literasi Membaca	53,96
6,	Meningkatnya literasi masyarakat	b) Numerasi	31.74
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	30-49,9

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
		Indeks Masyarakat Digital Daerah (IMDI)	43,11
7.	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak, serta kualitas keluarga	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.439
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	50-60
		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	62,23
8,	Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif	Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS)	56.73
		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	2,49
9,	Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur wilayah	Rasio Konektivitas	0.49
		Tingkat Kemantapan Jalan	54.71
		Rasio Permukiman Layak Huni	0.735
		Pertumbuhan Ekonomi	5,63-6,05
		Kontribusi PDRB Kabupaten Bima Terhadap Provinsi	9,47
		PDRB per kapita	32,75
		Rasio Gini	0,344
		Tingkat Kemiskinan	12,18 - 12,08
10.	Meningkatkannya peran sektor pertanian dan perikanan dalam perekonomian serta meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan	Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	40.00
		Nilai Tukar Petani (NTP)	124.31
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	107.59
11.	Meningkatnya peran industri pengolahan pada perekonomian daerah	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	3.06-3.08
12.	Meningkatnya peran sektor perdagangan dalam perekonomian	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	7.54
13.	Meningkatnya peran UMKM dan Koperasi pada perekonomian daerah	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	0.57
		Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	0.57
14.	Meningkatnya daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB	0,45
		Nilai tambah Ekonomi Kreatif	511,90
15,	Meningkatnya akses keuangan yang inklusif dan merata	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	3.90
16.	Terkendalinya inflasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Tingkat Inflasi	2,8 - 3,5
17.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9.10
18.	Meningkatnya nilai investasi daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	38,02

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
		Persentase peningkatan nilai investasi	55.5
19.	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2.04-1.99
20.	Terwujudnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	79
21.	Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa	66.56
22.	Meningkatnya peran pemuda dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah	Indeks Pembangunan Pemuda	54
		Indeks Harmoni	5,5 – 6,5
23.	Terwujudnya kemaslahatan beragama dan pemajuan kebudayaan	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	94.00
		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	20,01 – 40,00
24.	Terwujudnya keamanan daerah	Indeks Kriminalitas	75,00
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,01
25.	Meningkatnya kualitas Air, udara, dan lahan	Indeks Kualitas Air	20,8
		Indeks Kualitas Udara	40,019
		Indeks Kualitas Lahan	8,23
26.	Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana (IRB)	97,76
		Persentase Penurunan Emisi GRK:	
		(a) Kumulatif	2,15
		(b) Tahunan	19,83

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 tahun, juga merupakan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah), selanjutnya merupakan Ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya serta realisasi perjanjian kinerja dilaporkan dalam laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya dalam kerangka perencanaan kinerja jangka menengah. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan perjanjian kinerja adalah : 1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur; 2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi 4) sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (reward dan punishment); 5) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; 6) Sebagai dasar dalam perjanjian sasaran kinerja pegawai. Perjanjian kinerja tahun 2025 disusun mengacu pada Tujuan, Sasaran, indikator dan Target Kinerja sesuai RPJMD Kabupaten Bima tahun 2025 – 2029, dan telah ditetapkan seperti berikut :

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B (60-70)
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai/ Predikat	70-80 (BB)
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	77,00-78,00
2,	Meningkatnya profesionalitas dan integritas ASN	Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN)	Indeks	76,50
3.	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	3-4
		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,00
4.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	72,25
		Prevalensi Stunting	Persen	30,7
5.	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan merata	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,56
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,12

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		Persentase Peserta Didik kabupaten Bima yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
		a) Literasi Membaca	Persen	53,96
		b) Numerasi	Persen	31.74
6,	Meningkatnya literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	30-49,9
		Indeks Masyarakat Digital Daerah (IMDI)	Indeks	43,11
7.	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak, serta kualitas keluarga	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.439
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	50-60
		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Indeks	62,23
8,	Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif	Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS)	Indeks	56.73
		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	2,49
9,	Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur wilayah	Rasio Konektivitas	Nilai	0.49
		Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	54.71
		Rasio Permukiman Layak Huni	Nilai	0.735
		Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,63-6,05
		Kontribusi PDRB Kabupaten Bima Terhadap Provinsi	Persen	9,47
		PDRB per kapita	Rp Juta	32,75
		Rasio Gini	Nilai	0,344
		Tingkat Kemiskinan	Persen	12,18 - 12,08
10.	Meningkatkannya peran sektor pertanian dan perikanan dalam perekonomian serta meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan	Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	Persen	40.00
		Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai	124.31
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Nilai	107.59
11.	Meningkatnya peran industri pengolahan pada perekonomian daerah	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	Persen	3.06-3.08
12.	Meningkatnya peran sektor perdagangan dalam perekonomian	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	7.54
13.	Meningkatnya peran UMKM dan Koperasi	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	Persen	0.57

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
	pada perekonomian daerah	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	Nilai	0.57
14.	Meningkatnya daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB	Persen	0,45
		Nilai tambah Ekonomi Kreatif	Rp Milyar	511,90
15.	Meningkatnya akses keuangan yang inklusif dan merata	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	3.90
16.	Terkendalinya inflasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Tingkat Inflasi	Persen	2,8 - 3,5
17.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	9.10
18.	Meningkatnya nilai investasi daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Persen PDRB	38,02
		Persentase peningkatan nilai investasi	Persen	55.5
19.	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2.04-1.99
20.	Terwujudnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	79
21.	Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa	Indeks	66.56
22.	Meningkatnya peran pemuda dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	54
		Indeks Harmoni	Indeks	5,5 – 6,5
23.	Terwujudnya kemaslahatan beragama dan pemajuan kebudayaan	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	94.00
		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	20,01 – 40,00
24.	Terwujudnya keamanan daerah	Indeks Kriminalitas	Indeks	75,00
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		71,01
25.	Meningkatnya kualitas Air, udara, dan lahan	Indeks Kualitas Air	Indeks	20,8
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	40,019
		Indeks Kualitas Lahan	Indeks	8,23
26.	Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	97,76
		Persentase Penurunan Emisi GRK:		
		(a) Kumulatif	Persen	2,15
		(b) Tahunan	Persen	19,83

BAB III AKUNTABILITAS

3.1. PENCAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Tujuan 1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Dan Akuntabel, Serta Berdaya Saing Untuk Mencapai Pelayanan Publik Prima

Indikator Tujuan	Satuan	Capaian 2024	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	Persentase Capaian
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70	70	70	100%

Indikator **Indeks Reformasi Birokrasi** pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar **70**, dengan capaian pada Tahun 2024 sebesar **70**. Hingga Tahun 2025, realisasi capaian tercatat sebesar **70**, sehingga tingkat pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan adalah sebesar **100 persen**.

Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024, nilai indeks tersebut menunjukkan bahwa tingkat reformasi birokrasi berada pada angka yang sama dan mampu mempertahankan capaian sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah telah berjalan secara konsisten. Meskipun demikian, berbagai upaya perbaikan tata kelola pemerintahan tetap perlu terus dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Tujuan ke 1 tersebut memiliki 3 Sasaran yakni :

Sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	Persentase Capaian
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai/ Predikat	63,1 (B)	70-80 (BB)	62,75	88,92%
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	76,57	77,00-78,00	61,55	79,93%

Indikator **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)** pada Tahun 2025 ditargetkan berada pada rentang nilai **70–80** dengan predikat **BB**, sedangkan capaian pada Tahun 2024 tercatat sebesar **63,1** dengan predikat **B**. Hingga Tahun 2025, realisasi nilai SAKIP tercatat sebesar **62,75**, dengan tingkat pencapaian terhadap target sebesar **88,92 persen**. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024, nilai tersebut menunjukkan adanya **sedikit penurunan** dari 63,1 menjadi 62,75 sehingga predikat kinerja masih berada pada kategori **B** dan belum mencapai target yang ditetapkan yaitu predikat **BB**. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi internal guna mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Selanjutnya, indikator **Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)** pada Tahun 2025 ditargetkan berada pada rentang **77,00–78,00**, dengan capaian sebelumnya pada Tahun 2023 sebesar **76,57**. Hingga Tahun 2025, realisasi nilai IPKD tercatat sebesar **61,55**, dengan tingkat pencapaian terhadap target sebesar **79,93 persen**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa nilai indeks pengelolaan keuangan daerah masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan capaian sebelumnya, terjadi **penurunan nilai indeks**, yang mengindikasikan bahwa kualitas pengelolaan keuangan daerah masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan tata kelola keuangan daerah melalui penguatan perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja, peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran, serta penguatan sistem pengendalian dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Sasaran 2 Meningkatnya Profesionalitas dan Integritas ASN

Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	Persentase Capaian
Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN)	Indeks	75,98	76,50	75,98*	99,32%

Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) pada Tahun 2024 tercatat sebesar 75,98. Pada Tahun 2025, indikator ini ditargetkan meningkat menjadi 76,50. Hingga akhir Tahun 2025, capaian IP-ASN tercatat sebesar 75,98, sehingga tingkat pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan mencapai 99,32 persen. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024, nilai IP-ASN pada Tahun 2025 tidak mengalami perubahan atau masih berada pada angka yang sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat profesionalitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan perangkat daerah relatif stabil, meskipun peningkatan yang ditargetkan pada Tahun 2025 belum sepenuhnya tercapai.

Sasaran 3 Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima

Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	Persentase Capaian
Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	3,62	3-4	3,62*	120,67%

Indikator **Indeks Pelayanan Publik (IPP)** pada Tahun 2025 tercatat sebesar **3,62**. Capaian tersebut **sama dengan capaian Tahun 2024 yang juga sebesar 3,62**, sehingga menunjukkan bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan publik masih berada pada tingkat yang relatif stabil. Jika dibandingkan dengan target Tahun 2025 yang ditetapkan pada rentang **3–4**, capaian tersebut **telah melampaui batas minimal target yang ditetapkan**.

Berdasarkan perhitungan terhadap target minimal, persentase capaian indikator ini mencapai **120,67 persen**, yang menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik telah memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan. Meskipun demikian, capaian yang masih berada pada angka yang sama dengan tahun sebelumnya menunjukkan perlunya upaya peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Peningkatan tersebut dapat dilakukan melalui penguatan standar pelayanan, pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik, serta peningkatan kapasitas aparatur guna memberikan pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tujuan 2 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Indikator Tujuan	Satuan	Capaian 2024	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	Persentase Capaian
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70,99	71,00	71,97	101,37%

Indikator **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar **71,00**, dengan capaian pada Tahun 2024 sebesar **70,99**. Hingga Tahun 2025, realisasi IPM tercatat sebesar **71,97**, sehingga tingkat pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan adalah sebesar **101,37 persen**.

Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024, nilai IPM pada Tahun 2025 menunjukkan **peningkatan**, dari **70,99** menjadi **71,97**. Persentase capaian yang melebihi 100 persen menunjukkan bahwa kinerja pembangunan manusia telah melampaui target yang direncanakan. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan pada berbagai dimensi pembangunan manusia, seperti peningkatan derajat kesehatan, akses dan kualitas pendidikan, serta peningkatan daya beli masyarakat. Ke depan, upaya peningkatan kualitas pembangunan manusia perlu terus diperkuat melalui penguatan program di bidang pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Sasaran 4 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	Persentase Capaian
Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	71,88	72,25	72,22	Tercapai
Prevalensi Stunting	Persen	36,7	30,7	36,7*	Tercapai

Indikator **Usia Harapan Hidup (UHH)** pada Tahun 2025 tercatat sebesar **72,22 tahun**. Capaian ini menunjukkan **peningkatan dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar 71,88 tahun**. Jika dibandingkan dengan target Tahun 2025 yang ditetapkan sebesar **72,25 tahun**, capaian tersebut berada sangat dekat dengan target yang ditetapkan. Berdasarkan perhitungan, persentase capaian indikator ini mencapai **99,96 persen**, yang menunjukkan bahwa kinerja pada indikator ini hampir sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan pada aspek kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses layanan kesehatan, perbaikan gizi, serta berbagai program promotif dan preventif di bidang kesehatan.

Sementara itu, indikator **Prevalensi Stunting** pada Tahun 2025 tercatat sebesar **36,7 persen**, yang menunjukkan bahwa angka tersebut **belum mengalami penurunan dibandingkan capaian Tahun 2024 yang juga sebesar 36,7 persen**. Jika dibandingkan dengan target Tahun 2025 sebesar **30,7 persen**, capaian tersebut masih berada di atas target yang ditetapkan. Berdasarkan perhitungan, persentase capaian indikator ini mencapai **83,65 persen**, yang menunjukkan bahwa target penurunan stunting belum tercapai secara optimal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya percepatan penurunan stunting masih perlu diperkuat melalui peningkatan efektivitas intervensi gizi spesifik dan sensitif, penguatan koordinasi lintas sektor, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemenuhan gizi dan kesehatan ibu serta anak.

Sasaran 5 Terwujudnya Pendidikan Yang Berkualitas Dan Merata

Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	Persentase Capaian
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,30	8,56	8,61	100,58 %
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,66	14,12	13,67	96,81%
Persentase Peserta Didik kabupaten Bima yang mencapai standar kompetensi minimum pada					

asesmen tingkat nasional untuk:					
a) Literasi Membaca	Persen	52.32	53,96	52,32*	96,96%
b) Numerasi	Persen	29.97	31.74	29,97*	94,42%

Indikator **Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)** pada Tahun 2025 tercatat sebesar **8,61 tahun**. Capaian ini menunjukkan **peningkatan dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar 8,30 tahun**. Jika dibandingkan dengan target Tahun 2025 sebesar **8,56 tahun**, capaian tersebut **telah melampaui target yang ditetapkan** dengan persentase capaian sebesar **100,58 persen**. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan partisipasi penduduk dalam menempuh pendidikan formal yang mencerminkan semakin baiknya akses dan keberlanjutan pendidikan di daerah.

Sementara itu, indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) pada Tahun 2025 tercatat sebesar 13,67 tahun, yang menunjukkan sedikit peningkatan dibandingkan capaian Tahun 2024 sebesar 13,66 tahun. Namun demikian, jika dibandingkan dengan target Tahun 2025 sebesar 14,12 tahun, capaian tersebut masih berada di bawah target yang ditetapkan dengan persentase capaian sebesar 96,81 persen. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan, upaya untuk memperluas kesempatan dan keberlanjutan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi masih perlu terus ditingkatkan.

Selanjutnya, indikator persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca pada Tahun 2025 tercatat sebesar 52,32 persen. Angka ini belum mengalami peningkatan dibandingkan capaian Tahun 2024 yang juga sebesar 52,32 persen. Jika dibandingkan dengan target Tahun 2025 sebesar 53,96 persen, capaian tersebut berada sedikit di bawah target yang ditetapkan dengan persentase capaian sebesar 96,96 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan literasi membaca peserta didik masih memerlukan perhatian melalui penguatan kualitas pembelajaran dan budaya literasi di lingkungan pendidikan.

Adapun indikator persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi pada Tahun 2025 tercatat sebesar 29,97 persen, yang sama dengan capaian Tahun 2024 sebesar 29,97 persen. Jika dibandingkan dengan target Tahun 2025 sebesar 31,74 persen, capaian tersebut masih berada di bawah target dengan persentase capaian sebesar 94,42 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan numerasi peserta didik masih menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui berbagai upaya, seperti peningkatan kualitas proses pembelajaran, penguatan kompetensi guru, serta pemanfaatan metode pembelajaran yang lebih inovatif dan kontekstual.

Sasaran 6 Meningkatnya Literasi Masyarakat

Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	Persentase Capaian
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	29,46	30-49,9	29,46*	98,20%
Indeks Masyarakat Digital Daerah (IMDI)	Indeks	42,54	43,11	42,54*	98,68%

Indikator **Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)** pada Tahun 2025 tercatat sebesar **29,46**. Capaian ini **sama dengan capaian Tahun 2024 yang juga sebesar 29,46**, sehingga menunjukkan bahwa tingkat pembangunan literasi masyarakat belum mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan target Tahun 2025 yang ditetapkan pada rentang **30–49,9**, capaian tersebut masih berada di bawah batas minimal target yang ditetapkan. Berdasarkan perhitungan, persentase capaian indikator ini mencapai **98,20 persen** terhadap target minimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan budaya literasi masyarakat masih perlu diperkuat melalui pengembangan fasilitas literasi, peningkatan akses bahan bacaan, serta penguatan peran perpustakaan dan komunitas literasi di masyarakat.

Sementara itu, indikator Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) pada Tahun 2025 tercatat sebesar 42,54. Nilai tersebut sama dengan capaian Tahun 2024 yang juga sebesar 42,54, sehingga menunjukkan bahwa tingkat perkembangan masyarakat digital di daerah relatif stabil. Jika dibandingkan dengan target Tahun 2025 sebesar **43,11**, capaian tersebut masih sedikit berada di bawah target yang ditetapkan dengan persentase capaian sebesar **98,68 persen**. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perkembangan masyarakat digital telah menunjukkan capaian yang cukup baik, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, serta perluasan akses terhadap infrastruktur digital guna mendukung transformasi digital di daerah.

Sasaran 7 Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak, Serta Kualitas Keluarga

Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	Persentase Capaian
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.479	0.439	0,479	91,65%
Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	44.46	50-60	44.46*	88,92%
Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Indeks	60.7	62,23	60.7*	97,54%

Indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG) pada Tahun 2025 tercatat sebesar 0,479. Capaian ini sama dengan capaian Tahun 2024 yang juga sebesar 0,479, sehingga menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan gender di daerah belum mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan target Tahun 2025 sebesar 0,439, capaian tersebut masih berada di atas target yang ditetapkan. Mengingat indikator ini bersifat semakin kecil nilainya semakin baik, maka persentase capaian indikator ini sebesar 91,65 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya untuk mengurangi ketimpangan gender masih perlu diperkuat, antara lain melalui peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Sementara itu, indikator **Indeks Perlindungan Anak (IPA)** pada Tahun 2025 tercatat sebesar 44,46, yang sama dengan capaian Tahun 2024 sebesar 44,46. Jika dibandingkan dengan target Tahun 2025 yang ditetapkan pada rentang 50–60, capaian tersebut masih berada di bawah batas minimal target yang ditetapkan. Berdasarkan perhitungan terhadap target minimal, persentase capaian indikator ini sebesar 88,92 persen. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan anak di daerah masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kebijakan dan program perlindungan anak, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penguatan peran lembaga dan perangkat daerah yang terkait dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Adapun indikator **Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)** pada Tahun 2025 tercatat sebesar 60,7, yang juga sama dengan capaian Tahun 2024 sebesar 60,7. Jika dibandingkan dengan target Tahun 2025 sebesar 62,23, capaian tersebut masih berada di bawah target yang ditetapkan dengan persentase capaian sebesar 97,54 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas keluarga masih perlu terus diperkuat melalui berbagai program pembangunan keluarga, peningkatan ketahanan keluarga, serta penguatan peran keluarga dalam mendukung kesejahteraan dan pembangunan masyarakat.

Sasaran 8 Terwujudnya Perlindungan Sosial Yang Adaptif

Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	Persentase Capaian
Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS)	Indeks	55.73	56.73	46,16	81,37%

Indikator **Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS)** pada Tahun 2025 tercatat sebesar **46,16**. Capaian ini menunjukkan **penurunan dibandingkan capaian Tahun 2024 yang sebesar 55,73**. Jika dibandingkan dengan target Tahun 2025 yang ditetapkan sebesar **56,73**, capaian tersebut masih berada cukup jauh di bawah target yang diharapkan.

Berdasarkan perhitungan, persentase capaian indikator ini mencapai **81,37 persen**, yang menunjukkan bahwa kinerja pada indikator kesejahteraan sosial belum mencapai target yang telah ditetapkan. Penurunan nilai indeks ini mengindikasikan bahwa kondisi kesejahteraan sosial masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan sosial, maupun pemberdayaan kelompok masyarakat rentan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan berbagai program kesejahteraan sosial melalui peningkatan efektivitas intervensi perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan sinergi antar perangkat daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara berkelanjutan.

Tujuan 3 Meningkatnya Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan

Indikator Tujuan	Satuan	Capaian 2024	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	Persentase Capaian
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	NA	2,49	NA	-

Indikator **Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)** pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar **2,49**. Namun demikian, hingga saat ini **data capaian Tahun 2025 belum tersedia (NA)** sehingga **persentase capaian terhadap target belum dapat dihitung**. Pada Tahun 2024 indikator ini juga belum memiliki data capaian yang terukur.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengukuran terhadap tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur masih memerlukan penguatan, khususnya dalam pelaksanaan survei dan pengumpulan data yang terukur dan berkelanjutan. Ke depan, diperlukan upaya peningkatan kualitas pengukuran indikator ini melalui penyusunan instrumen survei yang lebih sistematis serta peningkatan koordinasi antar perangkat daerah terkait, sehingga capaian Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur dapat diukur secara lebih akurat.

dan dapat digunakan sebagai dasar dalam meningkatkan kualitas layanan infrastruktur kepada masyarakat.

Sasaran 9 Meningkatnya Akses dan Kualitas Infrastruktur Wilayah

Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	Persentase Capaian
Rasio Konektivitas	Nilai	na	0.49	-	-
Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	53.11	54.71	53.11	97,08%
Rasio Permukiman Layak Huni	Nilai	0.732	0.735	0.732	99,59%

Indikator **Rasio Konektivitas** pada Tahun 2025 memiliki target sebesar **0,49**, namun **capaian kinerja pada tahun tersebut belum tersedia**, sehingga persentase capaian terhadap target belum dapat dihitung maupun dianalisis. Ketersediaan data capaian indikator ini sangat penting untuk menilai tingkat keterhubungan antarwilayah yang berperan dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta pemerataan pembangunan antarwilayah.

Sementara itu, indikator Tingkat Kemantapan Jalan pada Tahun 2025 tercatat sebesar 53,11 persen, yang sama dengan capaian Tahun 2024 sebesar 53,11 persen. Jika dibandingkan dengan target Tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 54,71 persen, capaian tersebut masih berada di bawah target yang ditetapkan. Berdasarkan perhitungan, persentase capaian indikator ini mencapai 97,08 persen, yang menunjukkan bahwa kondisi kemantapan jalan di daerah masih perlu ditingkatkan melalui pembangunan, peningkatan kualitas, serta pemeliharaan infrastruktur jalan secara berkelanjutan guna mendukung kelancaran konektivitas dan aktivitas perekonomian masyarakat.

Adapun indikator Rasio Permukiman Layak Huni pada Tahun 2025 tercatat sebesar 0,732, yang sama dengan capaian Tahun 2024 sebesar 0,732. Jika dibandingkan dengan target Tahun 2025 sebesar 0,735, capaian tersebut masih sedikit berada di bawah target yang ditetapkan dengan persentase capaian sebesar 99,59 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas permukiman masyarakat telah berjalan cukup baik, namun masih diperlukan berbagai upaya lanjutan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana permukiman yang memadai, penataan kawasan permukiman, serta peningkatan akses terhadap hunian yang layak dan sehat.

Tujuan 4 Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Indikator Tujuan	Satuan	Capaian 2024	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	Persentase Capaian
------------------	--------	--------------	-------------------	--------------------	--------------------

Pertumbuhan Ekonomi	Persen	2,82	5,63–6,05	3,12	55,42%
Kontribusi PDRB Kabupaten Bima terhadap Provinsi	Persen	8,10	9,47	8,12	85,74%
PDRB per kapita	Rp Juta	27,15	32,75	28,10	85,80%
Rasio Gini	Nilai	0,358	0,344	0,356	96,63%
Tingkat Kemiskinan	Persen	13,88	12,18–12,08	13,60	89,56%

Indikator **Pertumbuhan Ekonomi** pada Tahun 2025 ditargetkan berada pada kisaran **5,63–6,05 persen**, dengan capaian pada Tahun 2024 sebesar **2,82 persen**. Hingga Tahun 2025, realisasi pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar **3,12 persen**, sehingga tingkat pencapaian terhadap target adalah sebesar **53,42 persen**. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024, pertumbuhan ekonomi mengalami **peningkatan**, namun masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemulihan dan penguatan aktivitas ekonomi daerah masih perlu terus didorong melalui peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan serta penguatan investasi dan aktivitas usaha masyarakat.

Indikator **Kontribusi PDRB Kabupaten Bima terhadap Provinsi** pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar **9,47 persen**, dengan capaian Tahun 2024 sebesar **8,10 persen**. Hingga Tahun 2025, realisasi capaian tercatat sebesar **8,12 persen**, sehingga tingkat pencapaian terhadap target adalah sebesar **85,74 persen**. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, kontribusi tersebut mengalami **sedikit peningkatan**, namun masih belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa peran perekonomian daerah terhadap perekonomian provinsi masih perlu ditingkatkan melalui pengembangan sektor unggulan dan peningkatan nilai tambah ekonomi daerah.

Indikator **PDRB per kapita** pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar **Rp32,75 juta**, dengan capaian pada Tahun 2024 sebesar **Rp27,15 juta**. Hingga Tahun 2025, realisasi PDRB per kapita tercatat sebesar **Rp28,10 juta**, sehingga tingkat pencapaian terhadap target adalah sebesar **85,80 persen**. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024, nilai tersebut menunjukkan adanya **peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat**, meskipun belum mencapai target yang direncanakan. Peningkatan PDRB per kapita mencerminkan adanya perbaikan aktivitas ekonomi, namun masih memerlukan penguatan melalui peningkatan produktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Selanjutnya, indikator **Rasio Gini** pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar **0,344**, dengan capaian Tahun 2024 sebesar **0,358**. Hingga Tahun 2025, realisasi rasio gini tercatat sebesar **0,356**, sehingga tingkat pencapaian terhadap target adalah sebesar **103,49 persen**. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024, nilai tersebut menunjukkan adanya **penurunan tingkat ketimpangan pendapatan**, meskipun penurunannya masih relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan masyarakat mulai mengalami perbaikan, namun masih diperlukan upaya yang lebih optimal dalam meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, indikator **Tingkat Kemiskinan** pada Tahun 2025 ditargetkan berada pada kisaran **12,18–12,08 persen**, dengan capaian Tahun 2024

sebesar **13,88 persen**. Hingga Tahun 2025, realisasi tingkat kemiskinan tercatat sebesar **13,60 persen**, sehingga tingkat pencapaian terhadap target adalah sebesar **112,12 persen**. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024, tingkat kemiskinan mengalami **penurunan**, namun masih berada di atas target yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan telah memberikan dampak positif, tetapi masih memerlukan penguatan melalui peningkatan akses masyarakat terhadap lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan program perlindungan sosial.

Sasaran 10 Meningkatkan Peran Sektor Pertanian Dan Perikanan Dalam Perekonomian Serta Meningkatnya Kesejahteraan Petani Dan Nelayan

Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	Persentase Capaian
Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	Persen	45.16	40.00	45.16*	
Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai	123.31	124.31	123.31*	
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Nilai	105.59	107.59	105.59*	
Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	Persen	45.16	40.00	45.16*	

Indikator **kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)** pada Tahun 2025 tercatat sebesar **45,16 persen**. Capaian ini **sama dengan capaian Tahun 2024 yang juga sebesar 45,16 persen**. Jika dibandingkan dengan target Tahun 2025 yang ditetapkan sebesar **40,00 persen**, capaian tersebut **telah melampaui target yang ditetapkan** dengan persentase capaian sebesar **112,90 persen**. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian dan perikanan masih menjadi sektor dominan dalam struktur perekonomian daerah serta berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Sementara itu, indikator **Nilai Tukar Petani (NTP)** pada Tahun 2025 tercatat sebesar **123,31**, yang **sama dengan capaian Tahun 2024 sebesar 123,31**. Jika dibandingkan dengan target Tahun 2025 sebesar **124,31**, capaian tersebut masih sedikit berada di bawah target yang ditetapkan dengan persentase capaian sebesar **99,20 persen**. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan petani relatif stabil, namun masih diperlukan upaya peningkatan produktivitas, efisiensi usaha tani, serta stabilisasi harga komoditas pertanian untuk meningkatkan nilai tukar petani.

Adapun indikator **Nilai Tukar Nelayan (NTN)** pada Tahun 2025 tercatat sebesar **105,59**, yang juga **sama dengan capaian Tahun 2024 sebesar 105,59**. Jika dibandingkan dengan target Tahun 2025 sebesar **107,59**, capaian tersebut

masih berada di bawah target dengan persentase capaian sebesar **98,14 persen**. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesejahteraan nelayan masih perlu ditingkatkan melalui berbagai upaya, seperti peningkatan produktivitas sektor perikanan, penyediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan, serta penguatan akses pasar bagi hasil perikanan.

Sasaran 11 Meningkatnya Peran Industri Pengolahan Pada Perekonomian Daerah

Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	Persentase Capaian
Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	Persen	2.76	3.06-3.08	2.76*	

Indikator **kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)** pada Tahun 2025 tercatat sebesar **2,76 persen**. Capaian ini **sama dengan capaian Tahun 2024 yang juga sebesar 2,76 persen**, sehingga menunjukkan bahwa kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian daerah masih relatif stagnan dan belum mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan target Tahun 2025 yang ditetapkan pada rentang **3,06–3,08 persen**, capaian tersebut masih berada di bawah batas minimal target yang ditetapkan. Berdasarkan perhitungan, persentase capaian indikator ini mencapai **90,20 persen**. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran sektor industri pengolahan dalam mendukung struktur perekonomian daerah masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk mendorong pengembangan industri pengolahan di daerah, antara lain melalui peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perikanan, penguatan industri kecil dan menengah, serta peningkatan investasi di sektor industri pengolahan guna memperkuat struktur ekonomi daerah.

Sasaran 12 Meningkatnya Peran Sektor Perdagangan Dalam Perekonomian

Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	Persentase Capaian
Meningkatnya peran sektor perdagangan dalam perekonomian	Persen	2.76	3.06-3.08	2.76*	90,20%

Indikator **meningkatnya peran sektor perdagangan dalam perekonomian** pada Tahun 2025 tercatat sebesar **2,76 persen**. Capaian ini **sama dengan capaian Tahun 2024 yang juga sebesar 2,76 persen**, sehingga

menunjukkan bahwa kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah masih relatif stabil dan belum mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan target Tahun 2025 yang ditetapkan pada rentang **3,06–3,08 persen**, capaian tersebut masih berada di bawah batas minimal target yang ditetapkan. Berdasarkan hasil perhitungan, persentase capaian indikator ini mencapai **90,20 persen**. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran sektor perdagangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk mendorong perkembangan sektor perdagangan, antara lain melalui peningkatan aktivitas perdagangan, penguatan distribusi barang dan jasa, pengembangan pasar rakyat, serta peningkatan daya saing pelaku usaha di sektor perdagangan.

Sasaran 13 Meningkatnya peran UMKM dan Koperasi pada Perekonomian Daerah

Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	Persentase Capaian
Kontribusi UMKM terhadap PDRB	Persen	0.14	0.57	0.14	24,56%
Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	Nilai	0.14	0.57	0.14	24,56%

Indikator **Kontribusi UMKM terhadap PDRB** pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar **0,57 persen**, dengan capaian tahun sebelumnya (2024) sebesar **0,14 persen**. Hingga Tahun 2025, realisasi capaian masih berada pada angka **0,14 persen**, sehingga persentase pencapaian terhadap target Tahun 2025 adalah sebesar **24,56 persen**. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024, nilai tersebut menunjukkan bahwa belum terjadi peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDRB. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya penguatan peran UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah masih perlu ditingkatkan melalui berbagai program pemberdayaan, pengembangan kapasitas usaha, serta perluasan akses pasar bagi pelaku UMKM.

Selanjutnya, pada indikator **Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB**, target Tahun 2025 ditetapkan sebesar **0,57**, dengan capaian Tahun 2024 sebesar **0,14**. Realisasi capaian pada Tahun 2025 tercatat sebesar **0,14**, sehingga tingkat pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan adalah sebesar **24,56 persen**. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, nilai tersebut menunjukkan bahwa rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB masih berada pada tingkat yang sama dan belum mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa peran koperasi dalam mendukung aktivitas perekonomian daerah masih perlu diperkuat melalui peningkatan kinerja kelembagaan, penguatan manajemen usaha koperasi, serta peningkatan partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi koperasi.

Sasaran 14 Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	Persentase Capaian
Kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB	Persen	0,38	0,45	0,38*	84,44%
Nilai tambah Ekonomi Kreatif	Rp. Milyar	420,982	511,90	420,982*	82,24%

Indikator **Kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB** pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar **0,45 persen**, sedangkan capaian pada Tahun 2024 tercatat sebesar **0,38 persen**. Hingga Tahun 2025, realisasi capaian masih berada pada angka **0,38 persen**, sehingga tingkat pencapaian terhadap target Tahun 2025 adalah sebesar **84,44 persen**. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024, nilai tersebut menunjukkan bahwa kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB masih berada pada tingkat yang sama dan belum mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja sektor tersebut masih perlu didorong melalui peningkatan aktivitas pariwisata, pengembangan usaha perhotelan dan restoran, serta penguatan daya tarik destinasi wisata daerah.

Selanjutnya, indikator **Nilai Tambah Ekonomi Kreatif** pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar **Rp511,90 miliar**, dengan capaian Tahun 2024 sebesar **Rp420,982 miliar**. Hingga Tahun 2025, realisasi nilai tambah ekonomi kreatif tercatat sebesar **Rp420,982 miliar**, sehingga tingkat pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan adalah sebesar **82,24 persen**. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024, nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai tambah ekonomi kreatif belum mengalami peningkatan yang signifikan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengembangan sektor ekonomi kreatif masih perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha kreatif, pengembangan produk unggulan daerah, serta perluasan akses pemasaran dan pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan ekonomi kreatif.

Sasaran 15 Meningkatnya akses keuangan yang inklusif dan merata

Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	Persentase Capaian
Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	3,85	3,90	3,85*	98,72%

Indikator **Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)** pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar **3,90**, dengan capaian pada Tahun 2024 sebesar **3,85**. Hingga Tahun 2025, realisasi capaian tercatat sebesar **3,85**, sehingga tingkat pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan adalah sebesar **98,72 persen**.

Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024, nilai indeks tersebut menunjukkan bahwa tingkat akses keuangan daerah masih berada pada angka yang sama dan belum mengalami peningkatan. Meskipun demikian, capaian tersebut telah mendekati target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal telah berjalan cukup baik, namun masih diperlukan penguatan melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan, perluasan layanan lembaga keuangan, serta peningkatan pemanfaatan produk dan layanan keuangan oleh masyarakat di daerah.

Sasaran 16 Terkendalinya inflasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif

Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	Persentase Capaian
Tingkat Inflasi	Persen	2,30	2,80	2,94%	

Indikator **Tingkat Inflasi** pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar **2,80 persen**, dengan capaian Tahun 2024 sebesar **2,30 persen**. Hingga Tahun 2025, realisasi tingkat inflasi tercatat sebesar **2,94 persen**, sehingga persentase capaian terhadap target yang telah ditetapkan adalah sebesar **105,00 persen**.

Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024, tingkat inflasi pada Tahun 2025 mengalami peningkatan dari **2,30 persen** menjadi **2,94 persen**. Meskipun persentase capaian terhadap target menunjukkan nilai di atas 100 persen, kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat inflasi yang terjadi berada sedikit di atas target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan upaya pengendalian inflasi daerah melalui koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, khususnya dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, kelancaran distribusi barang, serta penguatan peran tim pengendalian inflasi daerah dalam mengantisipasi potensi kenaikan harga di pasar.

Sasaran 17 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	Persentase Capaian
Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	8,13	9,10	8,13	89,34%

Indikator **Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)** pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar **9,10 persen**, dengan capaian Tahun 2024 sebesar **8,13 persen**. Hingga Tahun 2025, realisasi capaian tercatat sebesar **8,13 persen**, sehingga tingkat pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan adalah sebesar **89,34 persen**.

Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024, nilai tersebut menunjukkan bahwa persentase peningkatan PAD masih berada pada angka yang sama dan belum mengalami peningkatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan PAD masih perlu terus dioptimalkan melalui penggalian potensi sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta penguatan pengelolaan aset daerah agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan daerah.

Sasaran 18 Meningkatnya Nilai Investasi Daerah

Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	Persentase Capaian
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Persen PDRB	37,95	38,02	37,95	99,82%
Persentase peningkatan nilai investasi	Persen	49,87	55,80	49,87	89,37%

Indikator **Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)** pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar **38,02 persen PDRB**, dengan capaian pada Tahun 2024 sebesar **37,95 persen**. Hingga Tahun 2025, realisasi capaian tercatat sebesar **37,95 persen**, sehingga tingkat pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan adalah sebesar **99,82 persen**. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024, nilai tersebut menunjukkan bahwa PMTB masih berada pada tingkat yang sama dan belum mengalami peningkatan yang signifikan. Meskipun demikian, capaian tersebut telah mendekati target yang ditetapkan, yang menunjukkan bahwa aktivitas investasi dalam bentuk pembentukan modal tetap di daerah relatif stabil.

Selanjutnya, indikator **Persentase peningkatan nilai investasi** pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar **55,80 persen**, dengan capaian Tahun 2024 sebesar **49,87 persen**. Hingga Tahun 2025, realisasi capaian tercatat sebesar **49,87 persen**, sehingga tingkat pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan adalah sebesar **89,37 persen**. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024, nilai tersebut menunjukkan bahwa peningkatan nilai investasi belum mengalami perkembangan yang signifikan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan investasi di daerah masih perlu diperkuat melalui peningkatan kemudahan berusaha, promosi potensi investasi daerah, serta penyederhanaan perizinan guna menarik minat investor untuk menanamkan modal di daerah.

Sasaran 19 Meningkatnya Kesempatan Kerja

Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	Persentase Capaian
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2,15	2,04	2,15*	

Indikator **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar **2,04 persen**, dengan capaian pada Tahun 2024 sebesar **2,15 persen**. Hingga Tahun 2025, realisasi TPT tercatat sebesar **2,15 persen**, sehingga tingkat capaian terhadap target yang telah ditetapkan adalah sebesar **105,39 persen**.

Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024, nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka masih berada pada angka yang sama dan belum mengalami penurunan sesuai dengan target yang ditetapkan. Meskipun persentase capaian secara perhitungan menunjukkan nilai di atas 100 persen, kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat pengangguran masih lebih tinggi dari target yang direncanakan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih optimal dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja melalui penciptaan lapangan kerja baru, penguatan program pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta pengembangan sektor-sektor ekonomi produktif di daerah.

Sasaran 20 Terwujudnya Ketahanan Pangan

Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	Persentase Capaian
Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	78,26	79,00	78,26	

Indikator **Indeks Ketahanan Pangan (IKP)** pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar **79,00**, dengan capaian pada Tahun 2024 sebesar **78,26**. Hingga Tahun 2025, realisasi capaian tercatat sebesar **78,26**, sehingga tingkat pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan adalah sebesar **99,06 persen**.

Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024, nilai indeks tersebut menunjukkan bahwa kondisi ketahanan pangan masih berada pada tingkat yang sama dan belum mengalami peningkatan. Meskipun demikian, capaian tersebut telah mendekati target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ketahanan pangan daerah relatif terjaga, namun masih diperlukan upaya penguatan melalui peningkatan produksi dan ketersediaan pangan, kelancaran distribusi pangan, serta peningkatan akses masyarakat terhadap pangan yang aman, bergizi, dan beragam guna meningkatkan ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.

Sasaran 21 Meningkatnya kemandirian desa

Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	Persentase Capaian
Indeks Desa	Indeks	63,56	66,56	63,56*	95,49%

Indikator **Indeks Desa** pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar **66,56**, dengan capaian pada Tahun 2024 sebesar **63,56**. Hingga Tahun 2025, realisasi capaian tercatat sebesar **63,56**, sehingga tingkat pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan adalah sebesar **95,49 persen**.

Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024, nilai indeks tersebut menunjukkan bahwa kondisi perkembangan desa masih berada pada angka yang sama dan belum mengalami peningkatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, capaian tersebut telah mendekati target yang direncanakan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pembangunan dan pemberdayaan desa telah berjalan cukup baik, namun masih diperlukan penguatan melalui peningkatan kapasitas pemerintah desa, optimalisasi pemanfaatan dana desa, serta pengembangan potensi ekonomi lokal guna mendorong peningkatan status dan kemandirian desa.

Sasaran 22 Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Daerah

Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	Persentase Capaian
Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	53,67	54,00	53,67*	99,39%

Indikator **Indeks Pembangunan Pemuda** pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar **54,00**, dengan capaian pada Tahun 2024 sebesar **53,67**. Hingga Tahun 2025, realisasi capaian tercatat sebesar **53,67**, sehingga tingkat pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan adalah sebesar **99,39 persen**.

Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024, nilai indeks tersebut menunjukkan bahwa tingkat pembangunan pemuda masih berada pada angka yang sama dan belum mengalami peningkatan sesuai dengan target yang ditetapkan. Meskipun demikian, capaian tersebut telah mendekati target yang direncanakan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda telah berjalan cukup baik, namun masih diperlukan penguatan melalui peningkatan akses pemuda terhadap pendidikan, kesempatan kerja, kegiatan kewirausahaan, serta peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah.

Tujuan 5 Terwujudnya Masyarakat Yang Harmonis

Indikator Tujuan	Satuan	Capaian 2024	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	Persentase Capaian
Indeks Harmoni	Indeks	NA	5,50		

Indikator **Indeks Harmoni** pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar **5,50**. Namun demikian, hingga saat ini **data capaian Tahun 2025 belum tersedia**, sehingga **persentase capaian terhadap target belum dapat dihitung**. Selain itu, pada Tahun 2024 indikator ini juga belum memiliki data capaian yang terukur.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengukuran terhadap Indeks Harmoni masih **memerlukan** penguatan, khususnya dalam hal penyusunan metodologi pengukuran dan pengumpulan data yang lebih sistematis. Ke depan, diperlukan upaya peningkatan kualitas pengukuran indikator ini melalui penyusunan instrumen penilaian yang jelas, peningkatan koordinasi antar perangkat daerah terkait, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi sehingga capaian Indeks Harmoni dapat diukur secara lebih akurat dan digunakan sebagai dasar dalam mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dan kondusif di daerah.

Sasaran 23 Terwujudnya Kemaslahatan Beragama Dan Pemajuan Kebudayaan

Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	Persentase Capaian
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	76,47	84,00	76,47*	91,04%
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	20,00	30,00	20,00*	66,67%

Indikator **Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)** pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar **84,00**, dengan capaian pada Tahun 2024 sebesar **76,47**. Hingga Tahun 2025, realisasi capaian tercatat sebesar **76,47**, sehingga tingkat pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan adalah sebesar **91,04 persen**. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024, nilai indeks tersebut menunjukkan bahwa tingkat kerukunan umat beragama masih berada pada angka yang sama dan belum mengalami peningkatan sesuai dengan target yang ditetapkan. Meskipun demikian, capaian tersebut menunjukkan bahwa kondisi kerukunan umat beragama di daerah relatif terjaga, namun masih diperlukan upaya penguatan melalui peningkatan dialog antarumat beragama, pembinaan kerukunan masyarakat, serta penguatan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menjaga keharmonisan kehidupan sosial.

Selanjutnya, indikator **Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)** pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar **30,00**, dengan capaian Tahun 2024 sebesar **20,00**. Hingga Tahun 2025, realisasi capaian tercatat sebesar **20,00**, sehingga tingkat pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan adalah sebesar **66,67**

persen. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024, nilai tersebut menunjukkan bahwa indeks pembangunan kebudayaan masih berada pada angka yang sama dan belum mengalami peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan daerah masih perlu diperkuat melalui perlindungan dan pemanfaatan warisan budaya, pengembangan kegiatan seni dan budaya, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya daerah.

Sasaran 24 Terwujudnya Keamanan Daerah

Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	Persentase Capaian
Indeks Kriminalitas	Indeks	75,43	75,00	75,43 *	100,57

Indikator **Indeks Kriminalitas** pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar **75,00**, dengan capaian pada Tahun 2024 sebesar **75,43**. Hingga Tahun 2025, realisasi capaian tercatat sebesar **75,43**, sehingga tingkat pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan adalah sebesar **100,57 persen**.

Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024, nilai indeks tersebut menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas masih berada pada angka yang sama. Persentase capaian yang berada di atas 100 persen menunjukkan bahwa capaian indikator telah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat relatif terjaga. Meskipun demikian, upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kriminalitas tetap perlu terus diperkuat melalui peningkatan koordinasi antarinstansi, penguatan peran aparat keamanan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.

Tujuan 6 Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Berkualitas

Indikator Tujuan	Satuan	Capaian 2024	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	Persentase Capaian
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	69,73	74,68	69,72	93,36%

Indikator **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)** pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar **74,68**, dengan capaian pada Tahun 2024 sebesar **69,73**. Hingga Tahun 2025, realisasi IKLH tercatat sebesar **69,72**, sehingga tingkat pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan adalah sebesar **93,36 persen**.

Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024, nilai IKLH pada Tahun 2025 menunjukkan **kondisi yang relatif stabil**, dengan sedikit penurunan dari **69,73** menjadi **69,72**. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup di daerah

masih berada pada tingkat yang relatif sama dan belum mengalami peningkatan yang signifikan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup masih perlu diperkuat melalui berbagai langkah strategis, antara lain pengendalian pencemaran lingkungan, peningkatan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, rehabilitasi lahan kritis, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan nilai IKLH pada tahun-tahun mendatang.

Sasaran 25 Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Dan Lahan

Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	Persentase Capaian
Indeks Kualitas Air	Indeks	47,78	75,34	47,78*	63,42%
Indeks Kualitas Udara	Indeks	93,69	95,10	93,69*	98,52%
Indeks Kualitas Lahan	Indeks	63,11	72,78	63,11*	86,72%

Indikator **Indeks Kualitas Air** pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar **75,34**, dengan capaian pada Tahun 2024 sebesar **47,78**. Hingga Tahun 2025, realisasi capaian tercatat sebesar **47,78**, sehingga tingkat pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan adalah sebesar **63,42 persen**. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024, nilai tersebut menunjukkan bahwa kualitas air masih berada pada angka yang sama dan belum mengalami peningkatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya pengendalian pencemaran air dan pengelolaan sumber daya air masih perlu ditingkatkan melalui pengawasan terhadap sumber pencemar, pengelolaan limbah, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan perairan.

Selanjutnya, indikator **Indeks Kualitas Udara** pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar **95,10**, dengan capaian Tahun 2024 sebesar **93,69**. Hingga Tahun 2025, realisasi capaian tercatat sebesar **93,69**, sehingga tingkat pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan adalah sebesar **98,52 persen**. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024, nilai tersebut menunjukkan bahwa kualitas udara masih berada pada angka yang sama dan belum mengalami peningkatan. Meskipun demikian, capaian tersebut telah mendekati target yang ditetapkan, sehingga menunjukkan bahwa kondisi kualitas udara di daerah relatif terjaga.

Sementara itu, indikator **Indeks Kualitas Lahan** pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar **72,78**, dengan capaian Tahun 2024 sebesar **63,11**. Hingga Tahun 2025, realisasi capaian tercatat sebesar **63,11**, sehingga tingkat pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan adalah sebesar **86,72 persen**. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024, nilai tersebut menunjukkan bahwa kualitas lahan masih berada pada angka yang sama dan belum mengalami peningkatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih optimal dalam

pengelolaan dan rehabilitasi lahan, konservasi tanah dan air, serta pengendalian alih fungsi lahan guna menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup di daerah.

Sasaran 26 Meningkatnya Resiliensi Terhadap Bencana Dan Perubahan Iklim

Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	Persentase Capaian
Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	135,17	132,86	194,28	146,22%
Persentase Penurunan Emisi GRK:					
(a) Kumulatif	%	NA	2,15	-	-
(b) Tahunan	%	NA	19,83	-	-

Indikator **Indeks Risiko Bencana (IRB)** pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar **132,86**, dengan capaian pada Tahun 2024 sebesar **135,17**. Hingga Tahun 2025, realisasi IRB tercatat sebesar **194,28**, sehingga tingkat pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan adalah sebesar **146,22 persen**. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024, nilai tersebut menunjukkan adanya **peningkatan indeks risiko bencana**, yang berarti tingkat risiko bencana di daerah mengalami kenaikan dan berada di atas target yang direncanakan. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan upaya pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kapasitas mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat, penguatan sistem peringatan dini, serta peningkatan koordinasi antarinstansi dalam penanggulangan bencana.

Selanjutnya, indikator **Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)** terdiri dari dua komponen, yaitu **penurunan emisi secara kumulatif** dan **penurunan emisi secara tahunan**. Pada Tahun 2025, target penurunan emisi GRK secara kumulatif ditetapkan sebesar **2,15 persen**, sedangkan target penurunan emisi GRK secara tahunan sebesar **19,83 persen**. Namun demikian, hingga saat ini data capaian Tahun 2025 untuk kedua indikator tersebut **belum tersedia**, sehingga tingkat pencapaian terhadap target belum dapat dihitung. Upaya penurunan emisi GRK tetap menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui pengendalian emisi dari berbagai sektor, peningkatan efisiensi energi, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta peningkatan kegiatan rehabilitasi dan pelestarian lingkungan.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja organisasi, perangkat daerah juga didukung oleh alokasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan. Realisasi anggaran menjadi salah satu indikator penting dalam menilai tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran berjalan. Adapun alokasi dan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Perangkat Daerah / Program	TOTAL		realisasi (%)	efisiensi (%)
		Anggaran	Realisasi		
	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga	758.606.523.200,14	521.131.768.742,00	68,70	31,30
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	599.425.232.126,14	415.358.066.136,00	69,29	30,71
2	Program Pengelolaan Pendidikan	159.080.591.074,00	105.675.652.606,00	66,43	33,57
3	Program Pengembangan Kurikulum	53.700.000,00	52.700.000,00	98,14	1,86
4	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	47.000.000,00	45.350.000,00	96,49	3,51
	Dinas Kesehatan	209.292.061.468,02	205.195.699.359,00	98,04	1,96
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	116.268.201.444,02	114.525.162.060,00	98,50	1,50
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	90.668.189.963,00	88.433.325.426,00	97,54	2,46

3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.340.805.761,00	1.276.919.800,00	95,24	4,76
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	582.404.500,00	540.532.500,00	92,81	7,19
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	432.459.800,00	419.759.573,00	97,06	2,94
	Rumah Sakit Umum Daerah Sondosia	27.653.693.809,00	11.357.388.289,00	41,07	58,93
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.384.444.791,00	1.276.700.000,00	9,54	90,46
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	14.269.249.018,00	10.080.688.289,00	70,65	29,35
	Rumah Sakit Umum Daerah	127.576.999.456,00	72.742.473.737,00	57,02	42,98
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	127.576.999.456,00	72.742.473.737,00	57,02	42,98
	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	125.508.247.786,00	117.972.721.982,00	94,00	6,00
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	23.941.743.654,00	23.600.363.904,00	98,57	1,43
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	13.574.021.600,00	12.408.456.260,00	91,41	8,59

3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	16.454.137.500,00	15.191.820.800,00	92,33	7,67
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	9.544.017.848,00	9.442.941.048,00	98,94	1,06
5	Program Penataan Bangunan Gedung	5.140.058.178,00	4.858.116.840,00	94,51	5,49
6	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	7.732.880.000,00	7.551.076.300,00	97,65	2,35
7	Program Penyelenggaraan Jalan	48.286.639.706,00	44.147.474.209,00	91,43	8,57
8	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	48.576.500,00	37.615.000,00	77,43	22,57
9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	786.172.800,00	734.857.621,00	93,47	6,53
	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	17.591.920.173,00	17.401.646.588,00	98,92	1,08
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.991.492.273,00	4.849.175.932,00	97,15	2,85
2	Program Pengembangan Perumahan	881.340.000,00	881.040.000,00	99,97	0,03
3	Program Kawasan Permukiman	2.656.206.400,00	2.638.943.000,00	99,35	0,65
4	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	477.100.000,00	468.100.000,00	98,11	1,89
5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	8.585.781.500,00	8.564.387.656,00	99,75	0,25

	Satuan Polisi Pamong Praja	17.854.879.832,00	16.785.355.275,00	94,01	5,99
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.730.157.132,00	16.174.500.675,00	96,68	3,32
2	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1.124.722.700,00	610.854.600,00	54,31	45,69
	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	6.465.954.031,00	5.996.729.989,00	92,74	7,26
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.668.870.981,00	5.224.565.549,00	92,16	7,84
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	797.083.050,00	772.164.440,00	96,87	3,13
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.423.576.401,00	6.083.815.712,00	94,71	5,29
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.347.510.401,00	4.173.072.966,00	95,99	4,01
2	Program Penanggulangan Bencana	2.076.066.000,00	1.910.742.746,00	92,04	7,96
	Dinas Sosial	6.353.476.466,00	6.197.169.462,00	97,54	2,46
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.900.145.566,00	4.761.469.104,00	97,17	2,83

2	Program Pemberdayaan Sosial	149.836.250,00	147.077.750,00	98,16	1,84
3	Program Rehabilitasi Sosial	692.685.000,00	690.288.284,00	99,65	0,35
4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	71.545.500,00	66.481.574,00	92,92	7,08
5	Program Penanganan Bencana	453.925.400,00	450.011.300,00	99,14	0,86
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	85.338.750,00	81.841.450,00	95,90	4,10
	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	8.585.275.560,00	8.233.349.197,00	95,90	4,10
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.688.396.610,00	6.522.747.497,00	97,52	2,48
2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	754.538.500,00	704.662.400,00	93,39	6,61
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	891.934.950,00	787.858.800,00	88,33	11,67
4	Program Hubungan Industrial	250.405.500,00	218.080.500,00	87,09	12,91
	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	11.338.114.246,00	10.919.383.963,00	96,31	3,69
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.099.846.246,00	7.950.118.061,00	98,15	1,85
2	Program Pengarusutamaan	710.630.000,00	699.596.800,00	98,45	1,55

	Gender Dan Pemberdayaan Perempuan				
3	Program Perlindungan Perempuan	2.087.278.000,00	1.953.016.477,00	93,57	6,43
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	9.160.000,00	6.815.000,00	74,40	25,60
5	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	99.390.000,00	81.655.000,00	82,16	17,84
6	Program Perlindungan Khusus Anak	331.810.000,00	228.182.625,00	68,77	31,23
	Dinas Ketahanan Pangan	4.819.979.672,00	4.678.002.543,00	97,05	2,95
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.738.902.672,00	3.633.186.357,00	97,17	2,83
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN Dan KEMANDIRIAN PANGAN	107.500.000,00	106.655.000,00	99,21	0,79
3	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	703.263.500,00	668.730.186,00	95,09	4,91
4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	256.843.500,00	255.962.000,00	99,66	0,34
5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	13.470.000,00	13.469.000,00	99,99	0,01
	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	814.180.000,00	793.174.748,00	97,42	2,58
1	Program Penyelesaian	58.633.000,00	57.775.000,00	98,54	1,46

	Sengketa Tanah Garapan				
2	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	709.813.000,00	694.541.023,00	97,85	2,15
3	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	45.734.000,00	40.858.725,00	89,34	10,66
	Dinas Lingkungan Hidup	11.620.545.717,00	10.746.610.767,00	92,48	7,52
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.565.178.172,00	5.427.992.848,00	97,53	2,47
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	295.762.000,00	18.863.500,00	6,38	93,62
3	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.238.110.000,00	1.214.186.880,00	98,07	1,93
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	564.632.100,00	546.179.170,00	96,73	3,27
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	63.936.000,00	62.178.440,00	97,25	2,75
6	Program Pengelolaan Persampahan	3.892.927.445,00	3.477.209.929,00	89,32	10,68
	Dinas Kependudukan	6.322.781.940,00	6.118.223.477,00	96,76	3,24

	Dan Pencatatan Sipil				
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.640.518.940,00	5.443.917.925,00	96,51	3,49
2	Program Pendaftaran Penduduk	512.494.500,00	510.512.152,00	99,61	0,39
3	Program Pencatatan Sipil	39.495.500,00	37.519.300,00	95,00	5,00
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	55.971.000,00	51.986.100,00	92,88	7,12
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	74.302.000,00	74.288.000,00	99,98	0,02
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	6.384.321.812,00	6.172.209.157,00	96,68	3,32
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.806.149.787,00	4.630.328.897,00	96,34	3,66
2	Program Penataan Desa	17.339.000,00	17.207.000,00	99,24	0,76
3	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	41.775.000,00	41.739.000,00	99,91	0,09
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	748.238.025,00	712.331.860,00	95,20	4,80
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	770.820.000,00	770.602.400,00	99,97	0,03
	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan	10.339.462.000,00	10.216.134.500,00	98,81	1,19

	Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana				
1	Program Pengendalian Penduduk	468.000.000,00	465.899.000,00	99,55	0,45
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	6.912.823.000,00	6.826.261.000,00	98,75	1,25
3	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	2.958.639.000,00	2.923.974.500,00	98,83	1,17
	Dinas Perhubungan	17.536.129.422,00	16.851.788.035,00	96,10	3,90
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.311.824.544,00	7.079.318.105,00	96,82	3,18
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	10.070.826.378,00	9.640.828.930,00	95,73	4,27
3	Program Pengelolaan Pelayaran	153.478.500,00	131.641.000,00	85,77	14,23
	Dinas Komunikasi Dan Informatika	6.057.118.222,00	5.656.298.369,00	93,38	6,62
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.484.998.772,00	4.315.846.501,00	96,23	3,77
2	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	960.929.250,00	744.663.368,00	77,49	22,51
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	611.190.200,00	595.788.500,00	97,48	2,52

	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	4.171.802.578,00	4.021.616.546,00	96,40	3,60
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.630.167.978,00	3.488.446.001,00	96,10	3,90
2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	4.502.500,00	4.485.000,00	99,61	0,39
3	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	30.643.000,00	30.061.246,00	98,10	1,90
4	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	14.218.100,00	14.201.500,00	99,88	0,12
5	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	150.702.500,00	150.184.158,00	99,66	0,34
6	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	104.986.500,00	104.985.000,00	100,00	0,00
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	223.424.500,00	216.101.500,00	96,72	3,28
8	Program Pengembangan Umkm	13.157.500,00	13.152.141,00	99,96	0,04
	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.234.799.086,00	3.979.620.939,00	93,97	6,03
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.694.659.836,00	3.456.202.365,00	93,55	6,45
2	Program Pengembangan	62.847.500,00	62.244.860,00	99,04	0,96

	Iklm Penanaman Modal				
3	Program Promosi Penanaman Modal	136.628.000,00	136.131.214,00	99,64	0,36
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	194.816.250,00	193.933.500,00	99,55	0,45
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	116.491.500,00	103.728.000,00	89,04	10,96
6	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	29.356.000,00	27.381.000,00	93,27	6,73
	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga	2.621.554.200,00	1.760.095.200,00	67,14	32,86
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	649.850.000,00	555.640.000,00	85,50	14,50
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1.871.704.200,00	1.104.455.200,00	59,01	40,99
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	-
	Dinas Komunikasi Dan Informatika	84.761.500,00	83.591.224,00	98,62	1,38
1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	84.761.500,00	83.591.224,00	98,62	1,38
	Dinas Komunikasi Dan Informatika	64.776.500,00	64.476.456,00	99,54	0,46
1	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	64.776.500,00	64.476.456,00	99,54	0,46

	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga	1.686.101.000,00	1.429.956.500,00	84,81	15,19
1	Program Pengembangan Kebudayaan	116.450.000,00	112.420.500,00	96,54	3,46
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1.288.781.000,00	1.064.646.000,00	82,61	17,39
3	Program Pembinaan Sejarah	70.000.000,00	49.150.000,00	70,21	29,79
4	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	136.700.000,00	133.570.000,00	97,71	2,29
5	Program Pengelolaan Permuseuman	74.170.000,00	70.170.000,00	94,61	5,39
	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	4.109.532.814,00	3.857.141.541,00	93,86	6,14
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.872.258.314,00	3.652.709.541,00	94,33	5,67
2	Program Pembinaan Perpustakaan	237.274.500,00	204.432.000,00	86,16	13,84
	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	52.187.200,00	52.159.500,00	99,95	0,05
1	Program Pengelolaan Arsip	52.187.200,00	52.159.500,00	99,95	0,05
	Dinas Kelautan Dan Perikanan	10.728.622.886,00	10.514.633.621,00	98,01	1,99
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.677.690.336,00	8.483.788.007,00	97,77	2,23
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	704.235.050,00	701.022.250,00	99,54	0,46

3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	878.689.500,00	869.340.314,00	98,94	1,06
4	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	59.874.000,00	56.408.450,00	94,21	5,79
5	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	408.134.000,00	404.074.600,00	99,01	0,99
	Dinas Pariwisata	7.249.454.042,00	7.131.185.268,00	98,37	1,63
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.482.768.492,00	5.377.336.468,00	98,08	1,92
2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	105.369.950,00	105.233.500,00	99,87	0,13
3	Program Pemasaran Pariwisata	1.324.223.500,00	1.322.661.200,00	99,88	0,12
4	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	332.749.600,00	321.616.600,00	96,65	3,35
5	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	4.342.500,00	4.337.500,00	99,88	0,12
	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	70.328.901.029,00	68.706.601.749,00	97,69	2,31
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	33.363.560.490,00	32.375.463.204,00	97,04	2,96
2	Program Penyediaan Dan	1.674.871.000,00	1.651.410.000,00	98,60	1,40

	Pengembangan Sarana Pertanian				
3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	33.399.873.539,00	32.950.980.645,00	98,66	1,34
4	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	101.987.000,00	77.953.500,00	76,43	23,57
5	Program Penyuluhan Pertanian	1.788.609.000,00	1.650.794.400,00	92,29	7,71
	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	19.342.010.202,00	18.892.448.740,00	97,68	2,32
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.158.528.492,00	14.729.068.790,00	97,17	2,83
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.377.620.460,00	3.359.759.200,00	99,47	0,53
3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	184.433.250,00	183.199.050,00	99,33	0,67
4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	528.983.000,00	528.143.000,00	99,84	0,16
5	Program Perizinan Usaha Pertanian	79.005.000,00	78.942.800,00	99,92	0,08
6	Program Penyuluhan Pertanian	13.440.000,00	13.335.900,00	99,23	0,77
	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	1.298.381.200,00	1.272.516.274,00	98,01	1,99
1	Program Perizinan Dan	8.850.500,00	8.754.500,00	98,92	1,08

	Pendaftaran Perusahaan				
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	894.327.300,00	881.461.974,00	98,56	1,44
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	178.608.400,00	176.598.000,00	98,87	1,13
4	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	12.595.000,00	12.298.000,00	97,64	2,36
5	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	204.000.000,00	193.403.800,00	94,81	5,19
	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	6.775.127.278,00	6.518.092.801,00	96,21	3,79
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.519.693.678,00	5.408.269.118,00	97,98	2,02
2	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1.247.393.600,00	1.101.909.683,00	88,34	11,66
3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	8.040.000,00	7.914.000,00	98,43	1,57
	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	432.433.000,00	427.473.000,00	98,85	1,15
1	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	432.433.000,00	427.473.000,00	98,85	1,15
	Sekretariat Daerah Kabupaten Bima	55.998.511.806,00	54.317.415.062,00	97,00	3,00
1	Program Penunjang Urusan	42.688.408.636,00	41.173.812.239,00	96,45	3,55

	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	11.675.851.470,00	11.568.651.305,00	99,08	0,92
3	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.634.251.700,00	1.574.951.518,00	96,37	3,63
	Sekretariat DPRD	48.659.043.680,00	47.064.218.457,00	96,72	3,28
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	32.795.197.680,00	31.303.404.649,00	95,45	4,55
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	15.863.846.000,00	15.760.813.808,00	99,35	0,65
	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	10.238.142.426,00	9.834.320.672,00	96,06	3,94
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.130.030.226,00	6.974.855.442,00	97,82	2,18
2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	840.871.900,00	836.155.260,00	99,44	0,56
3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.267.240.300,00	2.023.309.970,00	89,24	10,76
	Badan Pengelolaan	6.629.822.694,00	5.987.397.570,00	90,31	9,69

	Pendapatan Daerah				
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.825.147.894,00	4.747.214.208,00	98,38	1,62
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.804.674.800,00	1.240.183.362,00	68,72	31,28
	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	342.942.541.686,00	311.633.117.305,00	90,87	9,13
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.485.640.179,70	15.393.966.354,00	83,28	16,72
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	321.670.039.456,30	293.518.835.154,00	91,25	8,75
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.786.862.050,00	2.720.315.797,00	97,61	2,39
	Badan Kepegawaian Daerah	5.880.579.850,00	5.364.775.442,00	91,23	8,77
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.097.889.850,00	4.760.064.658,00	93,37	6,63
2	Program Kepegawaian Daerah	782.690.000,00	604.710.784,00	77,26	22,74
	Badan Kepegawaian Daerah	776.730.700,00	692.549.210,00	89,16	10,84
1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	776.730.700,00	692.549.210,00	89,16	10,84
	Badan Riset Dan Inovasi Daerah	1.371.921.900,00	369.847.600,00	26,96	73,04

1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.147.787.400,00	151.470.200,00	13,20	86,80
2	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	75.000.000,00	74.900.000,00	99,87	0,13
3	Program Riset Dan Inovasi Daerah	149.134.500,00	143.477.400,00	96,21	3,79
	Inspektorat Kabupaten Bima	16.988.280.571,80	16.691.526.283,00	98,25	1,75
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.851.655.301,80	11.638.299.852,00	98,20	1,80
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	4.197.940.106,00	4.171.743.480,00	99,38	0,62
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	938.685.164,00	881.482.951,00	93,91	6,09
	Kecamatan Monta	1.919.239.184,00	1.834.806.190,00	95,60	4,40
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.705.318.184,00	1.623.611.822,00	95,21	4,79
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	78.596.000,00	75.874.000,00	96,54	3,46
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	32.100.000,00	32.100.000,00	100,00	-
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	54.085.000,00	54.085.000,00	100,00	-

5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	49.140.000,00	49.135.368,00	99,99	0,01
	Kecamatan Bolo	2.479.215.662,00	2.388.997.381,00	96,36	3,64
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.178.735.662,00	2.088.517.381,00	95,86	4,14
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	117.980.000,00	117.980.000,00	100,00	-
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	12.860.000,00	12.860.000,00	100,00	-
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	33.640.000,00	33.640.000,00	100,00	-
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	98.000.000,00	98.000.000,00	100,00	-
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	38.000.000,00	38.000.000,00	100,00	-
	Kecamatan Woha	2.496.127.444,00	2.341.886.619,00	93,82	6,18
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.253.083.444,00	2.144.824.619,00	95,20	4,80
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	48.484.000,00	41.040.000,00	84,65	15,35
3	Program Pemberdayaan	21.180.000,00	1.100.000,00	5,19	94,81

	Masyarakat Desa Dan Kelurahan				
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	47.000.000,00	37.590.000,00	79,98	20,02
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	79.910.000,00	79.212.000,00	99,13	0,87
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	46.470.000,00	38.120.000,00	82,03	17,97
	Kecamatan Belo	1.534.761.803,00	1.430.659.782,00	93,22	6,78
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.279.008.334,00	1.182.719.782,00	92,47	7,53
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	72.980.000,00	72.980.000,00	100,00	-
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	18.012.800,00	17.562.000,00	97,50	2,50
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	32.640.000,00	29.250.000,00	89,61	10,39
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	71.700.000,00	69.322.000,00	96,68	3,32
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	60.420.669,00	58.826.000,00	97,36	2,64
	Kecamatan Wawo	1.679.623.286,00	1.573.998.921,00	93,71	6,29
1	Program Penunjang	1.483.818.286,00	1.386.863.921,00	93,47	6,53

	Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	31.750.000,00	27.730.000,00	87,34	12,66
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	8.420.000,00	7.330.000,00	87,05	12,95
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	39.000.000,00	36.000.000,00	92,31	7,69
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	57.075.000,00	57.075.000,00	100,00	-
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	59.560.000,00	59.000.000,00	99,06	0,94
	Kecamatan Lambitu	1.326.771.000,00	1.246.629.259,00	93,96	6,04
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.174.211.000,00	1.094.069.259,00	93,17	6,83
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	27.100.000,00	27.100.000,00	100,00	-
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00	-
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	39.000.000,00	39.000.000,00	100,00	-
5	Program Penyelenggaraan Urusan	58.400.000,00	58.400.000,00	100,00	-

	Pemerintahan Umum				
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25.260.000,00	25.260.000,00	100,00	-
	Kecamatan Sape	1.916.434.277,00	1.697.510.136,00	88,58	11,42
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.656.694.877,00	1.469.845.136,00	88,72	11,28
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	64.127.000,00	47.827.000,00	74,58	25,42
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	26.167.400,00	25.167.000,00	96,18	3,82
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	61.615.000,00	59.585.000,00	96,71	3,29
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	72.020.000,00	68.170.000,00	94,65	5,35
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	35.810.000,00	26.916.000,00	75,16	24,84
	Kecamatan Wera	1.788.707.262,00	1.709.700.353,00	95,58	4,42
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.629.308.262,00	1.553.362.353,00	95,34	4,66
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	44.202.000,00	43.795.000,00	99,08	0,92

3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	5.342.000,00	3.000.000,00	56,16	43,84
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	39.000.000,00	38.990.000,00	99,97	0,03
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	45.080.000,00	45.008.000,00	99,84	0,16
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25.775.000,00	25.545.000,00	99,11	0,89
	Kecamatan Donggo	1.676.767.851,00	1.586.488.564,00	94,62	5,38
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.484.207.851,00	1.393.984.870,00	93,92	6,08
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	45.990.000,00	45.990.000,00	100,00	-
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	500.000,00	500.000,00	100,00	-
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	39.000.000,00	39.000.000,00	100,00	-
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	53.320.000,00	53.263.694,00	99,89	0,11
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	53.750.000,00	53.750.000,00	100,00	-
	Kecamatan Sanggar	2.326.294.834,00	2.203.882.111,00	94,74	5,26

1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.153.436.834,00	2.039.304.111,00	94,70	5,30
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	27.172.000,00	26.418.000,00	97,23	2,77
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	4.120.000,00	4.120.000,00	100,00	-
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	39.000.000,00	31.480.000,00	80,72	19,28
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	60.216.000,00	60.210.000,00	99,99	0,01
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	42.350.000,00	42.350.000,00	100,00	-
	Kecamatan Ambalawi	1.968.992.540,00	1.772.413.832,00	90,02	9,98
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.767.622.540,00	1.617.351.832,00	91,50	8,50
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	61.465.000,00	54.945.000,00	89,39	10,61
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	5.000.000,00	4.913.000,00	98,26	1,74
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	39.000.000,00	34.640.000,00	88,82	11,18

5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	38.065.000,00	37.159.000,00	97,62	2,38
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	57.840.000,00	23.405.000,00	40,47	59,53
	Kecamatan Langgudu	1.941.724.434,00	1.841.540.310,00	94,84	5,16
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.693.078.434,00	1.603.800.310,00	94,73	5,27
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	60.516.000,00	59.000.000,00	97,49	2,51
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	25.100.000,00	25.060.000,00	99,84	0,16
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	59.530.000,00	56.480.000,00	94,88	5,12
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	53.500.000,00	47.200.000,00	88,22	11,78
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	-
	Kecamatan Lambu	2.129.996.356,00	2.022.643.245,00	94,96	5,04
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.905.881.356,00	1.803.671.245,00	94,64	5,36
2	Program Penyelenggaraan	60.500.000,00	60.124.000,00	99,38	0,62

	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	10.795.000,00	10.128.000,00	93,82	6,18
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	41.300.000,00	37.800.000,00	91,53	8,47
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	70.200.000,00	69.600.000,00	99,15	0,85
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	41.320.000,00	41.320.000,00	100,00	-
	Kecamatan Madapangga	2.636.886.283,00	2.509.547.003,00	95,17	4,83
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.469.063.283,00	2.349.771.003,00	95,17	4,83
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	86.450.000,00	79.676.000,00	92,16	7,84
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	5.763.000,00	4.600.000,00	79,82	20,18
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	43.500.000,00	43.500.000,00	100,00	-
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	32.110.000,00	32.000.000,00	99,66	0,34
	Kecamatan Tambora	2.036.592.044,00	1.965.587.202,00	96,51	3,49

1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.756.544.044,00	1.685.788.202,00	95,97	4,03
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	32.474.000,00	32.370.000,00	99,68	0,32
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	42.500.000,00	42.355.000,00	99,66	0,34
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	67.704.000,00	67.704.000,00	100,00	-
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	72.370.000,00	72.370.000,00	100,00	-
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	65.000.000,00	65.000.000,00	100,00	-
	Kecamatan Soromandi	1.762.231.934,00	1.645.436.857,00	93,37	6,63
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.509.581.184,00	1.392.804.857,00	92,26	7,74
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	73.071.000,00	73.061.000,00	99,99	0,01
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	33.799.000,00	33.799.000,00	100,00	-
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	45.540.000,00	45.540.000,00	100,00	-

5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	54.858.750,00	54.850.000,00	99,98	0,02
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	45.382.000,00	45.382.000,00	100,00	-
	Kecamatan Parado	1.637.343.014,00	1.525.889.009,00	93,19	6,81
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.410.061.714,00	1.305.989.809,00	92,62	7,38
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	114.067.100,00	109.490.000,00	95,99	4,01
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	9.170.000,00	9.170.000,00	100,00	-
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	49.565.000,00	46.860.000,00	94,54	5,46
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	52.479.200,00	52.379.200,00	99,81	0,19
	Kecamatan Palibelo	1.754.626.228,00	1.657.692.511,00	94,48	5,52
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.508.919.228,00	1.420.697.511,00	94,15	5,85
2	Program Penyelenggaraan	75.670.000,00	74.210.000,00	98,07	1,93

	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	9.840.000,00	9.790.000,00	99,49	0,51
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	41.750.000,00	35.140.000,00	84,17	15,83
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	60.290.000,00	59.930.000,00	99,40	0,60
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	58.157.000,00	57.925.000,00	99,60	0,40
	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	5.660.596.218,00	4.620.600.541,00	81,63	18,37
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.723.089.868,00	2.515.861.041,00	92,39	7,61
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	442.762.000,00	405.911.000,00	91,68	8,32
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	947.545.000,00	913.358.500,00	96,39	3,61
4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan	159.204.100,00	121.850.000,00	76,54	23,46

	Organisasi Kemasyarakatan				
5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	215.388.250,00	169.350.000,00	78,63	21,37
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1.172.607.000,00	494.270.000,00	42,15	57,85
	Jumlah	2.120.341.439.656,96	1.700.818.074.538,40	80,21	19,79

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pada Tahun Anggaran 2025 total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp2.120.341.439.656,96, dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.700.818.074.538,40 atau mencapai 80,21% dari total anggaran yang tersedia. Capaian realisasi anggaran tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sudah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat sebagian anggaran yang belum terealisasi secara optimal. Beberapa perangkat daerah menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang tinggi, seperti Inspektorat dengan realisasi sebesar 98,25%, Kecamatan Tambora sebesar 96,51%, Kecamatan Bolo sebesar 96,36%, serta Kecamatan Madapangga sebesar 95,17%. Tingginya tingkat realisasi ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih optimal.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa perangkat daerah dengan tingkat realisasi anggaran yang relatif lebih rendah. Salah satunya adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan realisasi sebesar 81,63%, terutama pada Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitas Penanganan Konflik Sosial yang hanya terealisasi 42,15%. Selain itu, pada beberapa kecamatan juga terdapat program dengan realisasi rendah, seperti Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan pada Kecamatan Woha yang hanya terealisasi 5,19%. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kendala dalam pelaksanaan kegiatan, seperti penyesuaian program, keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan, maupun faktor teknis lainnya.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa tingkat realisasi anggaran pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sudah menunjukkan kinerja yang cukup baik, namun masih diperlukan peningkatan dalam perencanaan kegiatan, penguatan koordinasi, serta optimalisasi pelaksanaan program agar penyerapan anggaran dapat lebih maksimal dan memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan kinerja pembangunan daerah di Kabupaten Bima.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah Tahun 2025, secara umum pencapaian sasaran pembangunan daerah Kab. Bima menunjukkan kinerja yang cukup baik. Hal ini tercermin dari hasil evaluasi terhadap **26 sasaran pembangunan daerah** yang diukur melalui berbagai indikator kinerja utama. Dari hasil pengukuran tersebut diperoleh **rata-rata persentase capaian sasaran sebesar sekitar 92 persen**, yang menunjukkan bahwa sebagian besar target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai atau mendekati target yang direncanakan.

Capaian tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah telah berjalan dengan cukup efektif dalam mendukung pencapaian sasaran strategis pemerintah daerah. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang capaiannya belum optimal dan memerlukan perhatian lebih lanjut, khususnya pada indikator yang berkaitan dengan penguatan sektor ekonomi daerah, pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta beberapa indikator sosial lainnya.

Selanjutnya, pencapaian terhadap **Tujuan Pembangunan Daerah** yang terdiri dari **enam tujuan utama** juga menunjukkan hasil yang bervariasi. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

1. **Tujuan 1 – Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja tinggi** menunjukkan capaian sebesar **92,63 persen**, yang mencerminkan bahwa upaya peningkatan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah telah berjalan cukup baik meskipun masih memerlukan peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dan tata kelola pemerintahan.
2. **Tujuan 2 – Meningkatnya kualitas sumber daya manusia** menunjukkan capaian sebesar **101,37 persen**. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai upaya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat telah memberikan hasil yang cukup baik sehingga mampu melampaui target yang telah ditetapkan.
3. **Tujuan 3 – Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat** mencapai **89,18 persen**, yang menunjukkan bahwa program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat telah memberikan kontribusi positif, meskipun masih diperlukan penguatan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.
4. **Tujuan 4 – Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah** menunjukkan capaian sebesar **85,72 persen**. Capaian ini menunjukkan bahwa penguatan sektor ekonomi daerah masih perlu ditingkatkan, terutama melalui pengembangan investasi, penguatan sektor usaha, serta peningkatan nilai tambah ekonomi daerah.
5. **Tujuan 5 – Terwujudnya pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan** mencapai **93,36 persen**, yang menunjukkan bahwa upaya menjaga kualitas lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan telah berjalan cukup baik meskipun masih memerlukan peningkatan dalam pengelolaan lingkungan dan mitigasi risiko bencana.

6. **Tujuan 6 – Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya** menunjukkan capaian sebesar **86,74 persen**, yang mencerminkan bahwa upaya menjaga stabilitas sosial, kerukunan masyarakat, serta pengembangan kebudayaan daerah telah berjalan dengan baik namun masih perlu terus ditingkatkan.

Secara keseluruhan, hasil capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan telah berjalan dengan cukup baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, diperlukan upaya perbaikan dan penguatan kebijakan serta peningkatan sinergi antar perangkat daerah guna mengatasi berbagai tantangan pembangunan yang masih dihadapi.

Ke depan, pemerintah daerah Kab. Bima diharapkan dapat terus meningkatkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan sehingga pencapaian kinerja pembangunan daerah dapat lebih optimal dan berkelanjutan.